



Mengapa Memertahankan Bahasa Indonesia di Era Global?¹

Else Liliani Fakultas Bahasa dan Seni UNY

Abstrak

Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa di dunia yang terkena imbas globalisasi. Semakin kayanya jumlah kosakata karena serapan dari bahasa asing dan kemajuan teknologi, dikenalnya bahasa, masyasakat, dan budaya Indonesia kepada warga dunia lainnya, serta gaya bahasa penulisan sastra di Indonesia yang berkembang adalah beberapa contoh dampak positif globalisasi. Sebaliknya, hierarki kebahasaan menyebabkan stigmatisasi kebahasaan serta yang melunturnya kesadaran masyarakat akan penggunaan bahasa yang sadar konteks sekaligus peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu dan identitas bangsa Indonesia teridentifikasikan telah meluntur. Kondisi ini tentunya harus disiasati dengan sebuah strategi kebahasaan, antara lain dengan penggunaan bahasa asing yang menghegemonik sebatas fungsi komunikasi dan menghindari terbentuknya konstruksi ideologis dengan menunda persetujuan sehingga mampu menghasilkan masyarakat pengguna bahasa yang berkarakter polifonik.

Kata kunci: pengaruh globalisasi, bahasa Indonesia, strategi kebahasaan

Pengantar

Globalisasi adalah sebuah keniscayaan ketika batas-batas antarnegara menjadi semakin tipis karena gerak perekonomian yang mengglobal. Selayaknya bola salju yang terus menggelinding, globalisasi memiliki pengaruh yang tidak sedikit. Sistem sosial, pengetahuan, teknologi, budaya, agama, tak luput dari pengaruh globalisasi ini, termasuk bahasa.

Orientasi ekonomi global yang menerabas ruang dan waktu menyebabkan kebutuhan komunikasi menjadi semakin tinggi. Penguasaan bahasa-bahasa selain bahasa daerah dan bahasa nasional berubah menjadi semacam keharusan. Banyaknya program-program studi di Perguruan Tinggi yang mengajarkan bahasa asing serta bertambahnya tempat kursus bahasa asing yang semakin banyak peminatnya adalah salah satu bukti bahwa masyarakat kini mulai merasakan bahwa penguasaan bahasa asing adalah sebuah kebutuhan (dan keharusan).

¹ Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia XXX di Universitas Tidar Magelang tahun 2008





Apalagi, saat ini, beberapa perusahaan yang mencari tenaga kerja semakin banyak yang mencantumkan prasyarat penguasaan terhadap salah satu bahasa asing (biasanya bahasa Inggris), baik lisan maupun tulis. Beberapa iklan lowongan perusahaan di media massa nasional bahkan diiklankan dalam bahasa asing (Inggris).

Seperti layaknya negara-negara berkembang lainnya, globalisasi membawa pengaruh tersendiri untuk soal bahasa, tak terkecuali di Indonesia. Meningkatnya kosakata, dikenalnya bahasa Indonesia oleh masyarakat dunia lainnya, dan semakin kayanya karya sastra yang dihasilkan adalah beberapa sisi positif dari globalisasi. Sebaliknya, globalisasi juga menyebabkan adanya hierarki kebahasaan dan meluruhkan kesadaran berbahasa masyarakat. Tulisan ini akan mencoba membahas beberapa persoalan kebahasaan yang muncul karena globalisasi beserta strategi kebahasaan yang mungkin diterapkan untuk menghambat ancaman keterpinggiran bahasa Indonesia di era global.

Hegemoni Bahasa dalam Masyarakat Global

Bahasa dan masyarakat adalah dua hal yang tak terpisahkan. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa tak bisa lepas dari nuansa politik-ideologis. Keberhasilan hegemoni Barat atas Turki, misalnya, tampak oleh kebijakan pendidikan nasional negara itu pada tahun 1928 dengan dihapuskannya pelajaran bahasa Arab dan Persia di sekolah-sekolah. Tidak hanya itu, tulisan latin ditentukan sebagai tulisan yang menggantikan tulisan Arab, dan pendidikan agama di sekolah-sekolah pedesaan dan perkotaan lambat laun dihapuskan.

India adalah salah satu contoh lain bagaimana negara Barat menunjukkan hegemoninya dalam hal bahasa. Di India, bahasa Inggris yang *nota bene* adalah bahasa imperialis justru dipilih sebagai bahasa nasional. Bahkan, di sekolah-sekolah, pelajaran bahasa dan sastra Inggris menjadi suatu kewajiban. Spivak memberikan catatan terkait dengan hal ini (dalam Huda, 2004:115). Dia menilai bahwa pembelajaran bahasa Inggris secara wajib di sekolah-sekolah adalah suatu bentuk kekerasan epistemis. Menyikapi hal ini, dia mengusulkan untuk menggunakan bahasa imprial itu dalam konteks mekanisme kebahasaan saja. Sebaliknya, untuk hal-hal yang terkait dengan konstruksi ideologis atau pembentukan pemikiran, dia meminta pembaca untuk melakukan penundaan persetujuan untuk menghindari terbentuknya subjek kolonial.

Hal senada dikemukakan oleh Said dalam sebuah wawancara yang kemudian dibukukan oleh Gauri Viswanathan dengan judul *Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan* (2003, terj.). Said menilai bahwa kolonial acap kali menggunakan bahasa sebagai media peligitimasi kuasanya atas sang terjajah, terutama karena motif ekonomi (2003:393). Di sebuah sekolah tempat Said menuntut ilmu di Mesir, secara terang-terangan menyatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan dalam sekolah itu. Hukuman akan diterapkan bagi mereka yang melanggar peraturan itu, misalnya menggunakan bahasa daerah (bahasa Arab) dalam percakapan. Kondisi inilah yang menyebabkan terus terpeliharanya kedirian sang terjajah, karena meskipun penguasaan bahasa, sastra, dan pengetahuan mengenai Inggris mereka bagus, itu tidak akan membuat mereka *menjadi* Inggris.





Persoalan kebahasaan lain yang muncul di era global adalah adanya stigmatisasi bahasa. Singh (2007:162) memberikan contoh stigmatisasi bahasa yang terjadi di California pada 1998, berupa pelarangan pengajaran bahasa Spanyol bagi para Hispanik. Stigmatisasi bahasa juga menimpa orang-orang Punjabi yang berada di Inggris.

Penguasaan bahasa asing daripada bahasa asli membuat seseorang lebih tinggi kelas sosialnya. Masih ditemuinya dialek regional dalam berkomunikasi bisa menyebabkan seseorang dinilai rendah status sosialnya (Jones, 2007:205).

Faktor pendapatan adalah salah satu penyebab mengapa orang ingin menguasai bahasa asing di era global (Thornborrow, 2007:250). Hal ini dapat dipahami karena biasanya perusahaan transnasional menginvestasikan atau membesarkan usahanya di negara-negara yang lebih murah sumber daya manusianya atau lebih kaya sumber daya alamnya –yang biasanya ada di negara-negara berkembang. Oleh sebab itulah, penguasaan bahasa asing menjadi sebuah keperluan (dan kini keharusan).

Kondisi inilah yang dialami oleh negara-negara di dunia, terutama negara-negara berkembang. Penguasaan bahasa asing menjadi sebuah tuntutan atau keharusan. Dan kadang, yang muncul adalah pengingkaran terhadap bahasa asli atau nasionalnya, secara eksklusif maupun elusif. Proses menjadi bagian dari globalisasi terkadang juga mengikis identitas sebuah *nation* atau bangsa, yang biasanya diunifikasi atau dipersatukan oleh ras, sejarah, maupun kebahasaan (Cavallaro, 2004:227; Anderson, 2002:117).

Pengaruh Globalisasi terhadap Bahasa Indonesia

Pengaruh globalisasi terhadap bahasa Indonesia antara lain tampak pada kekayaan kosa kata bahasa Indonesia, lebih dikenalnya bahasa Indonesia oleh warga dunia lainnya, dan semakin kayanya karya sastra yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan kosakata dalam bahasa Indonesia memang menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Menurut Abdul Gaffar Ruskan, salah seorang peneliti Pusat Bahasa Depdiknas (www.kapanlagi.com), jumlah kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV saat ini mencapai kurang lebih seratus ribu kosakata. Selain adanya kata serapan bahasa asing, peningkatan jumlah kosakata ini disebabkan adanya pembakuan bahasa daerah sebagai bahasa Indonesia.

Jika diperhatikan, KBBI edisi III lebih banyak mengadopsi bahasa Jawa daripada bahasa-bahasa daerah. Ini terlihat, misalnya, pada halaman 1288-1289 yang berisi kata dan ungkapan bahasa daerah. Bahasa Jawa mendominasi lembar tersebut, disusul bahasa Sunda, Minang, Bali, Lombok dan Madura. Adanya niatan untuk membakukan kosakata dari bahasa derah lainnya, yakni Dayak dan bahasa-bahasa daerah lainnya pada edisi IV nanti perlu disambut dengan positif sebagai upaya untuk melestarikan bahasa daerah.

Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor yang turut menyebabkan penguasaan kosakata masyarakat kita menjadi kaya. Saat ini, masyarakat hampir telah mengenal istilah komputer, telepon seluler, *SMS*, *e-mail*, *download*, atau *homepage*. Beberapa istilah yang muncul karena kemajuan teknologi itu ada yang beberapa telah diindonesiakan. Misalnya, e-mail menjadi surat elektronik. SMS





(short message service) menjadi layanan pesan singkat, atau homepage yang menjadi laman, dan download menjadi mengunduh. Namun, ada kalanya masyarakat terkadang lebih memilih menggunakan istilah asing daripada mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia karena alasan kepraktisan, ketepatan makna, atau prestis belaka.

Globalisasi akhirnya membuat suatu negara memikirkan strategi agar tidak hanya sekedar menjadi saksi dalam globalisasi, namun juga berperan penting dan menjadi bagian di dalamnya. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing dan Program Darmasiswa. Misi BIPA dan Darmasiswa (dalam www.kain.depdiknas.org) antara lain mewujudkan program studi bagasa Indoensia di negara-negara sahabat, mewujudkan pengembangan pengenalan kebudayaan Indonesia di luar negeri, mewujudkan peningkatan jumlah peserta Darmasiswa RI, serta mewujudkan kerja sama kebudayaan di negara sahabat.

Dengan BIPA dan Darmasiswa tersebut, tentunya pemerintah Indonesia memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Di antaranya, mengenalkan kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Kepemilikan atau penguasaan bahasa seseorang akan menumbuhkan empati terhadap kebudayaan dan masyarakat pemilik bahasa tersebut. Jadi, semakin banyak masyarakat dunia yang mengenal bahasa, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia, harapannya akan semakin baik pula hubungan masyarakat Indonesia dengan masyarakat dunia lainnya. Saat ini, tercatat kurang lebih ada 41 negara yang menyelenggarakan BIPA.

Namun, penyelenggaraan BIPA selama ini belum berjalan mulus. Beberapa negara penyelenggara BIPA –seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia yang sulit diprediksi, mengalami fluktuatif jumlah peminatnya. Beberapa program studi bahasa Indonesia di negara sahabat terancam ditutup karena ketiadaan peserta (www.tempointeraktif.com). Kondisi ini dijumpai di Australia, Jerman, dan Belanda. Sebaliknya, minat program studi bahasa Indonesia di Jepang, Cina, Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi, dan negara serumpun justru naik. Kestabilan politik, keamanan, dan ekonomi tampaknya menjadi beberapa factor yang cukup berpengaruh terhadap penyelenggaraan BIPA.

Menyikapi fenomena pengajaran BIPA ini, di Yogyakarta pada Juni 2008 lalu, sejumlah pengajar BIPA bahkan membentuk APBISBA atau Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing. Lokakarya pengajaran BIPA ini difasilitasi oleh Pusat Bahasa Yogyakarta. APBISBA tak lain adalah sebuah wadah bagi para pengajar BIPA di berbagai universitas atau pusat-pusat pelatihan bahasa yang ada di Yogyakarta, yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing.

Program Darmasiswa sejauh ini relatif berjalan lebih lancar dengan adanya pemberian beasiswa bagi warga negara lain yang ingin mempelajari bahasa dan budaya masyarakat. UNY adalah salah satu universitas di Indonesia yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakannya. Peserta Darmasiswa cukup beragam, namun sebagian besar peminat berasal dari Cina, Korea, dan Jepang yang memang memiliki motif ekonomi kuat di Indonesia. Namun sayangnya, penentuan calon peserta program Darmasiswa tampaknya kurang selektif karena





tidak semua peserta program ini mengikuti program Darmasiswa karena minat dan keingintahuan terhadap bahasa dan budaya masyarakat Indonesia.

Perkembangan bahasa tentu berpengaruh terhadap penciptaan karya sastra karena bahasa lah yang menjadi media penciptaan karya sastra. Ketika kolonialisme Belanda masih berkuasa di Indonesia, karya-karya yang dijumpai umumnya banyak menggunakan peristilahan dalam bahasa Belanda. Hal ini bisa dipahami karena sastrawan kita saat itu adalah kaum cendekia atau intelektual yang lahir dari pendidikan Eropa (Belanda).

Pada tahun 30an, ketika *Belenggu* terbit, Armijn Pane bahkan mendapatkan masukan terkait dengan banyaknya peristilahan Belanda yang dia pergunakan. Seiring dengan sikap penjajah Jepang di tahun 40an yang lebih permisif dengan memberikan kesempatan untuk menggunakan bahasa Indonesia, karya sastra yang muncul saat itu mulai lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia –meskipun tentu saja masih ada penggunaan peristilahan Belanda yang bisa ditemui. Puisi-puisi karya Chairil Anwar kiranya dapat menjadi contoh betapa gaya bahasa Indonesia saat itu lebih hidup dan ekspresif. Demikian pula yang Nampak atas novel *Atheis* karya Achdiat K. Mihardja.

Kondisi Indonesia yang tak menentu, terutama di tahun 65an menghasilkan karya dengan gaya bahasa yang cenderung realis, jauh dari kesan "berbunga-bunga". Gaya ini dipertahankan hingga tahun 1970an. Terbukanya persentuhan dengan dunia luar era kepemimpinan Soeharto menyebabkan pengaruh mulai masuk ke Indonesia, termasuk di bidang sastra. Tengoklah karya-karya Iwan Simatupang atau Budi Darma yang dinilai meneruskan ciri absurditasnya Camus dan Sartre, atau drama mini kata Rendra, yang konon terpengaruh oleh Godot ketika dia baru saja belajar drama di Amerika (Soemanto, 2002:202-230).

Tahun 1980an, sastrawan Indonesia sangat lekat dengan warna lokal. Hal ini ditandai dengan *setting* cerita yang mengambil latar daerah (bukan perkotaan atau Jakarta) dan penggunaan leksikon bahasa daerah dalam karya-karyanya. Sastrawan yang dikenal dengan gaya serperti ini adalah Darmanto Jatman, Gunawan Muhammad, Linus Suryadi AG, YB Mangunwijaya, dan Umar Kayam, yang kebanyakan berasal dari Jawa. Hamsad Rangkuti dan AA Navis adalah sastrawan asal Sumatra yang juga terkenal dengan warna lokalnya.

Di penghujung tahun 90, sejak dibukanya keran reformasi di tahun 1998, sastra dilahirkan lebih dekat dengan realitas. Gaya bercerita dan berbahasanya cenderung apa adanya, blak-blakan, dan kadang menerjang hal-hal yang dinilai tabu sebelumnya. Nama Ayu Utami kiranya tak bisa ditinggalkan sebagai salah seorang sastrawan yang cenderung apa adanya dalam menulis. Gaya jurnalisme juga ditunjukkan Seno Gumira Ajidarma, sehingga membaca karyanya seolah seperti membaca sebuah berita di surat kabar: menyajikan fakta yang ditulis dengan bahasa sastra yang begitu memusingkan dengan metafora atau perumpamaan.

Namun, tidak selalu globalisasi itu memberikan dampak positif. Dampak negatif globalisasi terhadap persoalan kebahasaan ditandai dengan hierarki kebahasaan dan menipisnya kesadaran berbahasa sesuai konteks.





Tidak dapat dipungkiri, derasnya arus globalisasi telah membuat sejumlah orang untuk memutar otak agar tidak menjadi kaum pinggiran (*peripheral*, *marginal*) yang berperan minim dan kadang justru menjadi korban. Kondisi pragmatis ini tampaknya direspon dengan cepat oleh sejumlah pihak penyelenggara pendidikan, baik di tingkat formal maupun nonformal. Saat ini, hampir setiap perguruan tinggi memiliki program studi bahasa dan atau sastra asing. Program studi bahasa asing yang paling banyak ditemui adalah program studi bahasa (dan sastra) Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, dan Arab.

Selain membuka program studi, beberapa perguruan tinggi juga telah membuka studi-studi bahasa asing, semisal Korea dan Mandarin. Tempat-tempat kursus bahasa asing juga semakin banyak ditemui. Orientasi pragmatis dalam menghadapi pasar dunia kerja tampaknya tak bisa dinafikkan. Penguasaan bahasa asing setidaknya akan membuat para pencari kerja mampu melalui prasyarat yang diminta oleh perusahaan pencari kerja.

Seperti yang telah disampaikan oleh Thornborrow (2007:205), penguasaan bahasa asing di era global merupakan sikap pragmatis agar bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Kondisi seperti inilah yang saat ini tampaknya ditemui di masyarakat Indonesia. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, globalisasi membawa pengaruh adanya hierarki kebahasaan.

Sebenarnya, hierarki kebahasaan di Indonesia tidak saja muncul akhirakhir ini. Hierarki kebahasaan bahkan sudah ada sejak kolonialisme bercokol di Indonesia. Tengoklah ketika Belanda menjadi penguasa di negeri ini. Bahasa Belanda menjadi bahasa yang paling prestis di masyarakat Indonesia. Hanya segelintir orang, yakni kaum bangsawan yang elitis, yang bisa menguasai dan memperoleh pelajaran bahasa Belanda. Namun, meskipun kaum elit atau bangsawan kita mampu menguasai bahasa Belanda, mereka tetap tidak bisa sama atau *menjadi* Belanda.

Salah satu keuntungan dari dipelajarinya bahasa Belanda oleh orang-orang pribumi adalah adanya akses kemelekhurufan yang akhirnya berkembang menjadi literasi. Literasi membuat kesadaran berkebangsaan kaum elit itu tumbuh. Berkembangnya budaya literasi menyebabkan mereka mampu berinteraksi dengan masyarakat luar serta semakin menguatkan pemahaman sosial-kultural-politis-ideologis yang kelak bermanfaat bagi pengembagan ide kebangsaan. Sebagian pesar tokoh cendekia dan politik Indonesia saat itu mengenyam pendidikan *a la* Eropa.

Saat itu, bahasa Melayu (yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia) adalah bahasa kelas dua dalam masyarakat kita. Karena politik kolonial Belanda pula, bahasa Melayu terbagi menjadi Melayu Cina dan Melayu Jawa, meskipun Salmone (1985:223) meyakini bahwa Melayu Cina sebenarnya tidak ada, sehingga yang ada adalah Melayu Jawa yang digunakan oleh etnis Jawa, Belanda, dan Cina. Namun, tetap saja bahasa Belanda menduduki kelas teratas dalam masyarakat Indonesia kala itu.

Pada tahun 1940an, ketika Jepang menjajah Indonesia, kondisi kebahasaan kita agak mengalami perubahan. Bahasa Belanda yang dahulu mendominasi lambat laun semakin berkurang intensitas pengajarannya. Ini dikarenakan kebijakan pemerintahan Jepang yang melarang pengajaran bahasa Belanda dan





lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, dan tentu saja Jepang. Bahkan, pada saat itu, tidak hanya bahasa yang dijejalkan kepada masyarakat Indonesia, juga budayanya. Tengoklah bagaimana tokoh Sastro Darsono dalam novel *Para Priyayi* merasa sangat sakit hati karena dipaksa untuk menghormat kepada matahari setiap pagi dan dipaksa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang.

Pascakemerdekaan Indonesia, boleh dikatakan penggunaan bahasa Indonesia semakin mapan. Bahkan, pemerintahan Orde Baru saat itu dengan sangat piawai memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mendominasi, melegitimasi, dan melanggengkan kekuasaan dengan banyak melakukan eufimisme kebahasaan. Kata "diamankan" misalnya, adalah bentuk eufimisme penangkapan terhadap mereka yang dinilai dapat menggoyah kekuasaan Orde Baru. Karena tulisan mengenai praktik eufimisme bahasa Indonesia untuk keperluan politik sudah banyak dibahas oleh beberapa penelit atau ahli bahasa, tulisan ini tidak akan membahas persoalan itu lebih jauh lagi.

Mudahnya kapitalisme menanamkan kekuasaannya di Indonesia –antara lain dengan kebijakan penanaman modal asing yang terbuka lebar bagi perusahaan asing kala pemerintahan Orde Baru, menjadi awal dari masuknya legitimasi-hegemoni bahasa asing di Indonesia. Sejak saat itu, pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, jamak dijumpai di sekolah-sekolah.

Di era reformasi kini, pengajaran bahasa asing bisa dijumpai di dunia pendidikan, mulai tingkat TK hingga SMA. Bahkan, beberapa sekolah swasta (yang umumnya mencantumkan label "berstandar nasional atau internasional") mengajarkan bahasa asing, selain bahasa Inggris, misalnya Mandarin, Arab, Perancis, Korea, atau Jepang sebagai bahasa asing pilihan. Tujuannya tentu tak lain adalah untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi multibahasa sehingga tak akan gagap menghadapi dunia global.

Kondisi kebahasaan yang kurang menguntungkan di era global ini tentu saja paling terasa dalam bahasa daerah. Tidak semua sekolah-sekolah memberikan porsi yang cukup dalam pengajaran bahasa daerah. Beberapa sekolah memberikan bahasa daerah sebagai pelajaran Muatan Lokal (Mulok) bagi murid-muridnya, dengan jumlah jam pelajaran yang terbatas.

Pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah tentu saja harus dibarengi dengan sejumlah perlakuan. Rosidi (1983:254) menyarankan agar minat pelajaran bahasa daerah dapat didongkrak dengan dilengkapinya fasilitas sarana, media, dan tenaga pengajar bahasa daerah. Untuk melestarikan penggunaan bahasa daerah di tengah-tengah masyarakat, Rosidi menyarankan kepada pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki komunikasi berbahasa daerah yang baik.

Kenyataan di lapangan tampaknya cukup berbeda. Harian *Media Indonesia* pada 18 Februari 2008 melakukan penelitian terhadap penggunaan bahasa daerah di enam kota besar di Indonesia, yakni Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Medan, mencakup 480 responden dewasa yang dipilih secara acak dari buku petunjuk telepon. Petikan hasil penelitian seperti yang tercantum dalam www.mediaindonesia.com ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai posisi bahasa-bahasa daerah di Indonesia pada era global:





"Survei menanyakan kepada masyarakat tentang bahasa yang digunakan sehari-hari dalam keluarga responden. Responden yang masih menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari di keluarganya hanya sekitar 58%. Terdiri dari yang hanya menggunakan bahasa daerah ada 13%, sedangkan yang menggunakan bahasa daerahnya dengan bahasa Indonesia ada 46%. Pengguna yang hanya menggunakan bahasa Indonesia sudah mencapai 41%. Dari 46% responden yang menggunakan bahasa daerahnya maupun bahasa Indonesia pada percakapan sehari-hari dalam rumah tangga kemudian digali lebih dalam. Kepada mereka ditanyakan dua pertanyaan lagi. Yang pertama, dalam percakapan antara orang tua dan anaknya, bahasa apa yang paling sering digunakan. Mayoritas responden atau 62% menjawab bahasa Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya, bahasa apa yang paling sering digunakan dalam percakapan antaranak-anak dalam keluarga. Bahasa Indonesia lebih banyak lagi dipilih. Dijawab oleh 62% responden. Dari jawaban-jawaban responden di atas, penggunaan bahasa nasional (bahasa Indonesia) dalam keluarga sudah memasyarakat, khususnya di keenam kota besar. Banyak kalangan yang menilai, bila tidak diimbangi dengan kesadaran pentingnya bahasa daerah, maka bahasa daerah itu akan punah digerus penggunaan BahasaIndonesia." (www.mediaindonesia.com)

Bahasa daerah ada pada lapisan terbawah dari hegemoni bahasa yang saat ini terjadi. Peringkat pertama tentu saja diisi oleh bahasa-bahasa asing, disusul bahasa Indonesia. Selain banyaknya peminat program studi, pusat pelatihan atau kursus bahasa asing, ada beberapa fakta yang saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki paradigma bahwa bahasa asing ada di atas bahasa Indonesia.

Media adalah salah satu sarana yang cukup berpengaruh di masyarakat. Saat ini, masyarakat sudah sangat memaklumi jika sebuah iklan dilayangkan dalam bahasa asing (Inggris). Pengakuan keunggulan bahasa asing, pernah dimunculkan secara terang-terangan oleh lembaga bimbingan pendidikan swasta yang mengiklankan "bahasa Inggris + matematika = sukses." Iklan tersebut secara tak langsung menunjukkan bahwa penguasaan bahasa asing (bahasa Inggris) adalah lebih penting, karena dapat menjamin kesuksesan. Media, dengan demikian, adalah sarana yang cukup efektif untuk mempengaruhi massa dan membentuk konstruksi ideologis.

Pemanfaatan media juga bisa menjadi cermin kesadaran masyarakat Indonesia dalam berbahasa. Saat ini, pemirsa televisi disuguhi gambar-gambar hidup selebritis, politisi, elit-pejabat, atau tokoh masyarakat yang dengan mudah menggunakan alih-campur kode dengan biasa dan tanpa maksud, bahkan mungkin hanya sekedar prestis belaka (ingat tulisan Jones, pen.). Persoalan campur kode atau alih kode adalah suatu hal yang biasa dalam praktik komunikasi. Namun, sejauh ini, alih-campur kode itu tdak dimaksudkan untuk sekedar memenuhi prestis suatu kelas sosial tertentu. Ataukah, praktiknya sekarang sudah mengarah ke sana, bahwa mereka yang mampu berbahasa asing –setidaknya





memunculkannya dalam komunikasi sehari-hari-- menunjukkan kelas sosialnya yang lebih tinggi?

Seseorang yang kebetulan muncul di media dengan dialek kedaerahan tertentu bahkan bisa menjadi bahan lelucon. Misye Arsita dalam Ketoprak Humor kerap menjadi lelucon karena bahasa Indonesia-nya *medhok* atau sangat kental logat Jawa-nya. Ketika Nadine Chandrawinata salah menyebut Indonesia sebagai *city* dan bukan *country*, publik ramai-ramai memberikan komentar, salah satunya adalah ketidakpantasan seorang wakil Indonesia di tingkat dunia salah berbahasa.

Stigmatisasi bahasa inilah yang saat ini banyak ditemui di masyarakat. Telah terjadi sikap merendahkan terhadap bahasa asli atau bahasa daerah. Celakanya, gejala stigmatisasi terhadap bahasa nasional juga mulai ada. Sebenarnya, seandainya masyarakat sadar akan konteks dan peran bahasa Indonesia selama ini, tentu saja stigmatisasi itu tak akan terjadi.

Strategi Kebahasaan di Era Global

Praktik hierarki-hegemoni bahasa serta stigmatisasi bahasa yang saat ini terjadi memerlukan suatu strategi tersendiri agar masyarakat pengguna bahasa asli atau nasional tidak merasa tertinggal dalam penguasaan bahasa asing dan sekaligus mamu menjaga serta melestarikan bahasa nasional atau bahasa asli itu sendiri. Kasus hegemoni bahasa Inggris di Turki, India, dan Mesir serta beberapa negara (yang pernah) terjajah lainnya kiranya sudah cukup memberikan pelajaran bahwa globalisasi (kolonialisme-kapitalisme) bisa menjadi suatu ancaman sekaligus peluang bagi perkembangan suatu bahasa.

Usul Spivak untuk memanfaatkan bahasa asing sebatas mekanisme-komunikasi –dan bukan konstruksi ideologis yang menghasilkan kekerasan epistemis, tampaknya dapat diterapkan. Pembelajaran sastra atau budaya suatu masyarakat yang dipelajari hendaknya menjadi dasar dari terciptanya karakter polifonik (Cavallaro, 2004:236). Karakter polifonik ini nantinya akan menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran dan toleransi mengenai keberagaman. Selain menciptakan karakter polifonik, pembelajaran sastra atau budaya masyarakat hendaknya diimbangi dengan kesadaran kritis melalui sejumlah interpretasi yang bisa menunda persetujuan terhadap konstruksi ideologis yang diusulkan oleh penguasa.

Strategi penciptaan karakter polifonik yang tak terjebak kekerasan epistemis dapat di lakukan di tingkat formal (yang biasanya menjadi semen hegemonik suatu kekuasaan). Keberadaan bahasa asing untuk dipelajari agar bisa bertahan di era global adalah suatu kebutuhan, namun pemeliharaan bahasa nasional dan daerah juga tak kalah penting. Hari Bahasa atau *Language Day* dan Pojok Bahasa atau *Language Corner* adalah contoh-contoh strategi kebahasaan yang dapat diterapkan di tingkat formal. *Language Day* adalah penetapan waktu atau hari kapan suatu bahasa itu wajib dipergunakan. Bahasa yang ditetapkan dalam *Language Day* sebaiknya meliputi bahasa asing, daerah, dan nasional atau bahasa Indonesia, dan digunakan secara proporsional. *Language Corner* yang lebih bernuansa santai tetap dapat diterapkan di sekolah-sekolah formal, masyarakat, atau dalam keluarga.





Setepat apapun sebuah strategi, jika tidak didukung dengan kesadaran berbahasa yang tinggi, tidak akan mampu mencapai situasi kebahasaan yang ideal di suatu masyarakat. Karena itu, lembaga pemerintah seperti Dinas Pendidikan (Dasar, Menengah, maupun Tinggi), Pusat Bahasa, dan lembaga lainnya memiliki peran yang cukup besar untuk mengajak masyarakat Indonesia mencintai dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas bangsa Indonesia.

Sebuah identitas mungkin dihubungkan dengan kesamaan ras, kesamaan sejarah, dan kesamaan bahasa. Identitas itu telah tercermin dalam Sumpah Pemuda yang dikumandangkan oleh pemuda-pemuda Indonesia yang menyadari penuh identitas keindonesiaan mereka dalam satu tanah air, bangsa, dan bahasa: Indonesia. Apa jadinya jika identitas ini tergerus?

Beberapa tindak nyata untuk mengajak masyarakat mencintai bahasa Indonesia telah banyak dilakukan oleh masyarakat dan instansi swasta serta negeri. Ajakan simpatik untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia adalah langkah positif yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya pelestarian-penggunaan bahasa Indonesia. Peringatan Bulan Bahasa, Hari Buku, Hari Sumpah Pemuda, Haul Chairil Anwar (seperti yang rutin dilakukan mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNY) atau peringatan nasional lain merupakan momentum efektif untuk mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia dalam kesempatan umum, yang sadar akan konteks dan fungsi.

Catatan Akhir

Globalisasi adalah sebuah keniscayaan, demikian pula pengaruhnya terhadap kehidupan, termasuk bahasa. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa di dunia yang juga terkena imbas dari globalisasi. Jumlah kosakata yang semakin kaya karena adanya kata-kata serapan dari bahasa asing atau daerah dan kemajuan teknologi adalah salah satunya. Selain itu, globalisasi memungkinkan untuk dikenalnya bahasa, masyasakat, dan budaya Indonesia kepada warga dunia lainnya. Peningkatan jumlah kosakata dan perkembangan masyarakat juga mempengaruhi gaya bahasa penulisan sastra di Indonesia.

Namun, tidak selamanya globalisasi memberikan dampak yang positif. Dampak globalisasi lainnya adalah terjadinya hierarki kebahasaan yang berujung kepada tujuan pragmatisme ekonomi –sesuai dengan karakteristik globalisasi (kapitalisme global). Kondisi tersebut di atas dapat menjadi parah seandainya kesadaran penggunaan dan penghargaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas tidak ditingkatkan. Peran serta masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta di tataran formal maupun nonformal perlu ditingkatkan untuk menyikapi persoalan itu.

Akhirnya, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan kebahasaan yang ditemui di era global. Pertama adalah adanya pembatasan untuk menggunakan bahasa asing dalam mekanisme komunikasi, dan bukan konstruksi ideologis. Kedua, menunda persetujuan konstruksi ideologis yang ditawarkan oleh suatu wacana kesastraan atau kebudayaan dengan melakukan interpretasi kritis terhadapnya. Jika hal ini dilakukan, maka





kemungkinan untuk menghasilkan pribadi yang berkarakter polifonik atau mampu menghargai keragaman dapat terjaga. Segi positifnya adalah terhindarnya stigmatisasi bahasa dan terjaganya eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, pemersatu, dan identitas bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. 2002. *Komunitas-komunitas Terbayang* (terj. Omi Intan Naomi). Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar.
- Cavallaro, Dani. 2004. *Critical and Cultural Theory* (terj. Laily Rahmawati). Yogyakarta: Sufi Books.
- Huda, Nurul. 2004. "Membongkar Kekerasan Epistemis dalam *Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas* (ed. Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto). Yogyakarta: Kanisius.
- Jones, Jason. 2007. "Bahasa dan Kelas Sosial" dalam *Bahasa, Kekuasaan, danMasyarakat* (ed. Linda Thomas dan Shan Wareing, terj.Sunoto dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosidi, Ajip. 1983. "Pengembangan Bahasa Daerah" dalam *Pembinaan Minat Baca, Bahasa, dan Sastra*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Salmone, Claudine. 1985. *Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu* (terj. Dede utomo). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Singh, Sitla. 2007. "Bahasa dan Representasi" dalam *Bahasa, Kekuasaan, danMasyarakat* (ed. Linda Thomas dan Shan Wareing, terj.Sunoto dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemanto, Bakdi. 2002. *Godot di Amerika dan Indonesia: Suatu Studi Banding*. Jakarta: Grasindo.
- Thornborrow, Joanna. 2007. "Bahasa dan media" dalam *Bahasa, Kekuasaan, danMasyarakat* (ed. Linda Thomas dan Shan Wareing, terj.Sunoto dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Viswanathan, Gauri (ed). 2003. *Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan: Wawancara dengan Edward Said.* Yogyakatra: Pustaka Promothea.

Sumber Internet

- "Bahasa Daerah di Tengah Ancaman Kepunahan". 24 Mei 2008. Diakses dari www.mediaindonesia.com pada 30 Juli 2008.
- "Kosakata Kamus Bahasa Indonesia Capai 100 Ribu". 27 Mei 2008. Diakses dari www.kapanlagi.com pada 30 Juli 2008.
- "Minat Orang Asing Belajar Bahasa Indoenesia Menurun". 12 Juli 2007. Diakses dari www.tempointeraktif.com pada 30 Juli 2008.
- "Situs resmi Kajian Indonesia Depdiknas" diakses dari <u>www.kain.depdiknas.org</u> pada 30 Juli 2008.